

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

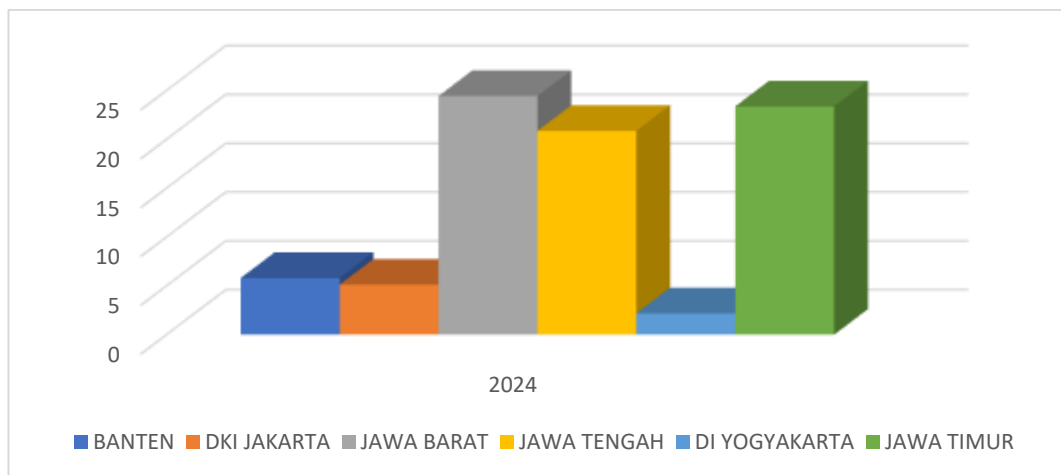
Penyerapan tenaga kerja merupakan indikator penting yang menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Hal ini secara langsung berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran, stabilitas sosial, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi. Faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran signifikan dalam hal ini (Dwika T & Anandari, 2025). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja secara proporsional. Kualitas dan distribusi lapangan kerja di wilayah tersebut masih belum merata. Faktor internal seperti pendidikan serta kondisi makroekonomi sangat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Haydarsyah & Nilasari, 2024). Meskipun jumlah tenaga kerja yang terserap mengalami peningkatan. Namun, karena tingginya arus migrasi dan bertambahnya jumlah angkatan kerja baru dapat menyebabkan penyerapan tenaga kerja masih belum optimal.

Fungsi Produksi Cobb–Douglas, diperkenalkan oleh Charles W. Cobb dan Paul H. Douglas (1928) dalam Putri & Dewi (2025), membahas hubungan langsung antara output dan input produksi, khususnya modal dan tenaga kerja. Kedua faktor tersebut merupakan determinan utama dalam proses produksi. Teori ini juga kerap digunakan dalam penelitian terkait penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, *Human Capital Theory* dari Theodore Schultz (1961) dan Gary Becker (1964) dalam Oltular (2025) menyoroti pentingnya investasi pada pendidikan dan pelatihan

untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sementara itu, *Classical Labour Demand Theory* yang dikemukakan oleh Adam Smith (1776) dalam Smith (2023) menekankan pentingnya peran modal dan produktivitas dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi dan biaya upah. Terakhir, pendekatan *Keynesian Aggregate Demand* yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes (1936) memandang permintaan agregat sebagai faktor utama yang menentukan output dan tingkat ketenagakerjaan.

Pulau Jawa menjadi fokus utama karena peranannya yang sangat signifikan terhadap perekonomian dan pasar tenaga kerja di Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia tercatat stabil pada kisaran 57,05% pada tahun 2023 dan 57,02% 2024, dan lebih dari separuh penduduk Indonesia sekitar 55,93% berdomisili di wilayah ini. Jawa memiliki basis ekonomi yang besar, struktur industri yang beragam, serta karakteristik wilayah yang heterogen, mencakup Jakarta sebagai pusat jasa, Jawa Barat dan Jawa Timur pada industri manufaktur, Jawa Tengah pada sektor padat karya, hingga Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan layanan. Dengan seluruh karakteristik tersebut, Jawa menjadi representasi paling komprehensif untuk memahami dinamika pasar kerja di Indonesia, dibandingkan dengan daerah lain yang perekonomiannya relatif lebih kecil. Hasil penelitian oleh Haydarsyah & Nilasari (2024), Damayanti (2024), serta Muna et al. (2024) menekankan bahwa penyerapan tenaga kerja di Jawa sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan regional. Oleh karena itu, Jawa merupakan wilayah yang paling strategis untuk memahami mekanisme penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Penyerapan tenaga kerja merupakan indikator yang mencerminkan sejauh mana perekonomian mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif. Di Pulau Jawa, tingkat penyerapan tenaga kerja mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan struktur ekonomi di setiap provinsi serta perubahan aktivitas produksi dari waktu ke waktu. Grafik berikut ini memperlihatkan perkembangan penyerapan tenaga kerja di masing-masing provinsi di Jawa.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (data diolah)

**Gambar 1.1 Penyerapan Tenaga Kerja (Jumlah Penduduk Bekerja) di Pulau Jawa Menurut Provinsi Tahun 2024 (Orang)**

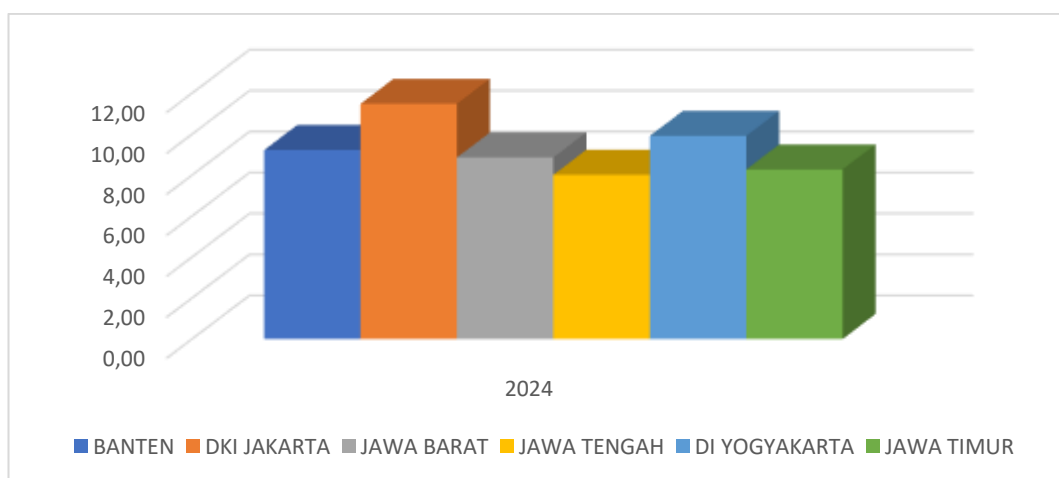
Berdasarkan Gambar 1.1 Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi pusat utama penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jawa Barat menempati posisi teratas dengan 24,417 juta orang, yang tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk usia kerja di wilayah tersebut serta dominannya sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Jawa Timur menyusul dengan 23,361 juta orang, disusul Jawa Tengah yang menyerap 20,861 juta orang, yang menunjukkan bahwa sektor-sektor tradisional seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, serta UMKM masih memegang peran penting

dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Meskipun produktivitas per pekerja di provinsi ini umumnya lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain, jumlah tenaga kerja yang terserap tetap signifikan. Perubahan struktur ekonomi di negara-negara berkembang secara signifikan memengaruhi permintaan terhadap tenaga kerja (Andabayeva et al., 2024). Banten mencatat jumlah penduduk bekerja sebanyak 5,798 juta orang, sedangkan DKI Jakarta sebesar 5,108 juta orang. Meski dikenal sebagai pusat ekonomi nasional, jumlah tenaga kerja yang terserap di Jakarta relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi Jakarta yang lebih padat modal dan berorientasi pada jasa bernilai tambah tinggi, sehingga tidak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Provinsi dengan angka terendah adalah DI Yogyakarta, yang hanya menyerap 2,183 juta orang. Jumlah ini sejalan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Yogyakarta yang memang lebih kecil dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Walaupun demikian, sektor pendidikan, pariwisata, dan jasa tetap memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah tersebut. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa tahun 2024 masih didominasi oleh provinsi dengan jumlah penduduk besar dan sektor ekonomi yang padat karya, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sementara itu, provinsi dengan ekonomi berbasis jasa modern dan wilayah yang relatif kecil, seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih terbatas. Berdasarkan data dan analisis yang ada, tren penyerapan tenaga kerja ini sejalan dengan temuan penelitian Muhyiddin et al. (2024) yang membahas peta penyerapan tenaga kerja di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa.

Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian Indonesia, dengan hampir seluruh sektor industri dan jasa terkonsentrasi di wilayah ini. Namun demikian, ketika membahas penyerapan tenaga kerja, situasinya tidak sebaik yang sering diasumsikan. Jawa menghadapi permasalahan struktural yang cukup signifikan, di mana jumlah angkatan kerja yang sangat besar tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Data menunjukkan bahwa persentase penyerapan tenaga kerja di Jawa hanya mengalami kenaikan tipis, dari 93,95% pada tahun 2017 menjadi 94,13% pada tahun 2023. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Kalimantan (95,44%) dan Papua (95,97%) pada periode yang sama. Artinya, meskipun Jawa memiliki basis ekonomi terbesar di Indonesia, tingkat penyerapan tenaga kerjanya justru lebih rendah daripada beberapa wilayah lain (Haydarsyah & Nilasari, 2024). Gap ini semakin kompleks ketika dilihat dari variabel ekonomi lain. Investasi domestik (PMDN) di Jawa memang menunjukkan peningkatan, namun sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa pertumbuhan investasi, khususnya pada sektor padat modal dan berteknologi tinggi, tidak secara otomatis meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sektor-sektor tersebut lebih banyak mengandalkan mesin dan teknologi dibandingkan penambahan tenaga kerja. Sebaliknya, investasi dan pertumbuhan usaha pada sektor UMKM terbukti jauh lebih efektif dalam menyerap tenaga kerja (Rizal & Mustapita, 2024). Analisis mengenai pengaruh pengeluaran rumah tangga terhadap penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa dampaknya sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan kesiapan struktur usaha, apabila daya beli masyarakat rendah atau struktur usaha

tidak mampu menyerap tenaga kerja, maka efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi terbatas (Silvia et al., 2024). Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa masih jauh dari ideal. Meskipun aktivitas ekonomi sangat tinggi, persentase penyerapan tenaga kerja justru relatif rendah, tidak stabil, dan berfluktuasi. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah angkatan kerja yang tersedia dan kebutuhan pasar kerja. Ketidakseimbangan ini menuntut perhatian serius, khususnya faktor-faktor yang secara signifikan dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa dalam beberapa tahun terakhir.

Pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperkuat daya saing sumber daya manusia. Di Pulau Jawa, rata-rata lama sekolah menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu secara langsung berdampak pada pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, terutama dalam jangka waktu yang singkat. Grafik berikut memperlihatkan perkembangan rata-rata lama sekolah di setiap provinsi di Pulau Jawa.

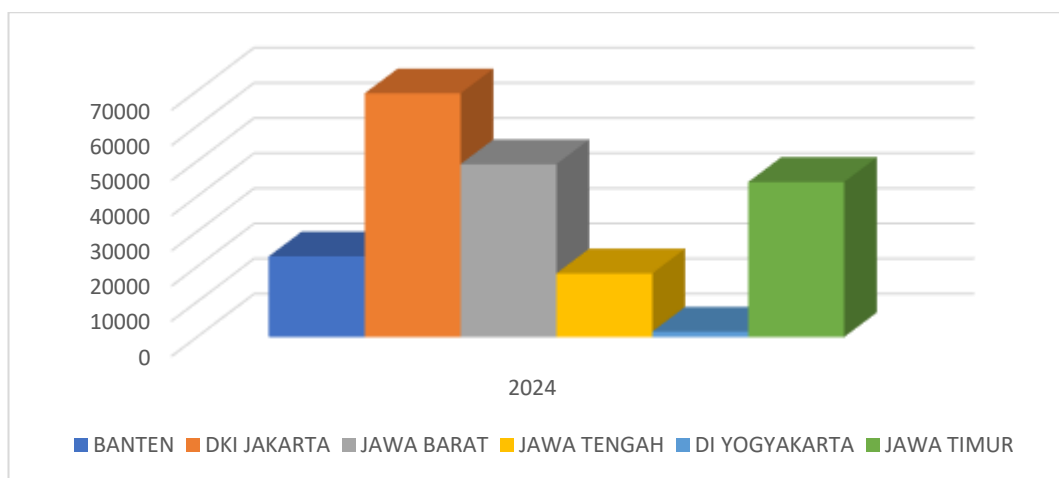


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (data diolah)

**Gambar 1.2 Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) di Pulau Jawa Menurut Provinsi Tahun 2024 (Tahun)**

Berdasarkan Gambar 1.2 Rata-rata lama sekolah (RLS) 6 provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2024. Melalui grafik ini, terlihat jelas adanya kesenjangan yang cukup signifikan antarprovinsi terkait tingkat pendidikan, yang disebabkan oleh variasi akses, kualitas, serta pembangunan sumber daya manusia di masing-masing daerah. DKI Jakarta menempati posisi tertinggi sebesar 11,49 tahun yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Jakarta telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA, bahkan mendekati jenjang perguruan tinggi. DI Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, sehingga tingkat pendidikannya relatif tinggi dengan angka 9,92 tahun. Sejalan dengan temuan riset Lestari et al. (2025) yang menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Banten memperoleh keuntungan dari kedekatannya dengan pusat ekonomi nasional, sehingga mendorong warganya untuk menempuh pendidikan lebih lama, dengan 9,23 tahun. Sebaliknya, ketiga provinsi ini masih berada di bawah 9 tahun. Jawa Tengah 8,02 tahun, Jawa Timur 8,28 tahun, dan Jawa Barat 8,87 tahun. Sebagian besar penduduk di ketiga provinsi ini baru menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Hal ini terjadi karena sektor pekerjaan di wilayah tersebut masih didominasi oleh tenaga kerja lulusan rendah hingga menengah, seperti sektor pertanian, industri padat karya, dan sektor informal. Secara keseluruhan, pada tahun 2024 kualitas pendidikan di Pulau Jawa masih belum merata. Provinsi dengan perekonomian yang didominasi sektor jasa dan administrasi umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sementara wilayah yang perekonomiannya masih bergantung pada tenaga kerja cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Investasi melalui realisasi PMDN diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja sangat bergantung pada jenis investasi yang dilakukan. Terdapat investasi yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja, namun ada pula yang lebih mengutamakan penggunaan mesin dibandingkan tenaga manusia. Grafik berikut ini menunjukkan perkembangan realisasi PMDN di Pulau Jawa.



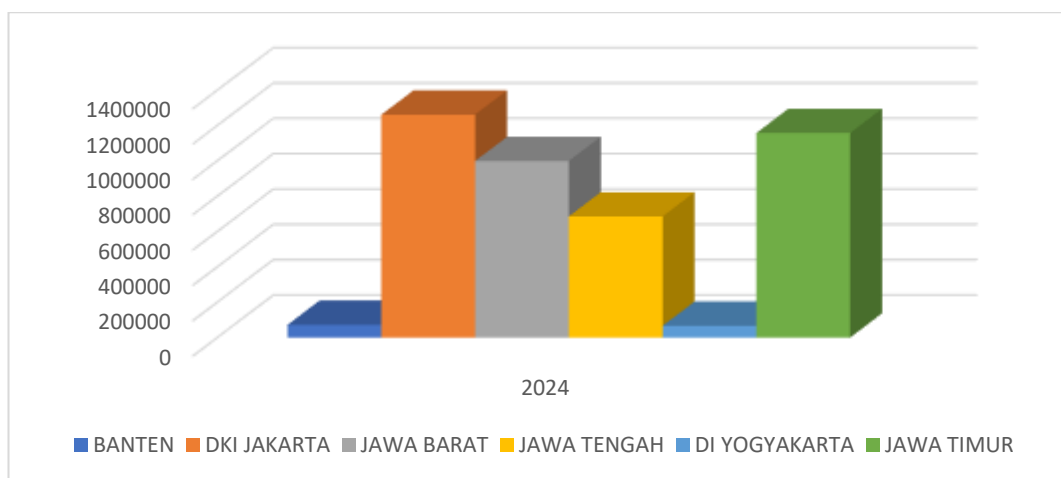
Sumber: Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2026 (data diolah)

**Gambar 1.3 Investasi (Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)) di Pulau Jawa Menurut Provinsi Tahun 2024 (Miliar Rupiah)**

Berdasarkan Gambar 1.3 Investasi realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2024, masih terkonsentrasi di provinsi-provinsi dengan perekonomian yang besar, meskipun terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antarwilayah. DKI Jakarta menempati posisi teratas dalam hal nilai investasi, mencapai Rp69.334,557 miliar. Hal ini tidak mengherankan mengingat Jakarta merupakan pusat bisnis, keuangan, dan perdagangan nasional. Meskipun penyerapan tenaga kerja tidak terlalu tinggi, Jakarta tetap menjadi magnet utama bagi para investor. Posisi berikutnya ditempati oleh Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar Rp49.181,868 miliar, disusul Jawa Timur sebesar Rp44.131,948

miliar. Besarnya investasi di kedua provinsi ini berkaitan erat dengan keberadaan sektor industri pengolahan dan manufaktur yang memang membutuhkan modal besar, baik untuk menambah kapasitas produksi maupun melakukan pembaruan teknologi. Sejalan dengan penelitian Andabayeva et al., (2024) menunjukkan bahwa negara-negara berkembang terus menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja mereka, khususnya ketika investasi pada sektor yang padat modal mengalami kenaikan. Banten menyusul dengan nilai investasi Rp22.962,864 miliar, sementara Jawa Tengah sebesar Rp18.124,506 miliar. Meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur, kedua provinsi ini tetap memegang peranan penting, terutama sebagai daerah penyangga industri dan kawasan yang banyak menyerap tenaga kerja. Penelitian Taqiyyuddin (2023) serta Gaol & Suharianto (2024) sama sama menunjukkan bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, khususnya apabila PDRB meningkat dan investasi diarahkan ke sektor padat karya. Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi paling bawah terkait realisasi PMDN, yakni hanya sebesar Rp1.575,443 miliar. Rendahnya nilai investasi ini disebabkan oleh skala ekonomi yang terbatas serta dominasi sektor jasa, pendidikan, dan pariwisata, sehingga kebutuhan investasi fisik tidak sebesar provinsi lainnya. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, distribusi investasi domestik di Pulau Jawa masih belum merata. Provinsi dengan basis industri dan jasa modern masih mendominasi, sedangkan daerah lain belum mendapatkan porsi investasi yang signifikan.

Konsumsi rumah tangga umumnya mencerminkan kekuatan daya beli masyarakat serta pergerakan permintaan agregat. Namun, perubahan konsumsi rumah tangga tidak selalu berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja, karena terkadang terdapat perubahan pada struktur usaha atau dorongan efisiensi dalam proses produksi. Grafik di bawah ini memperlihatkan perkembangan konsumsi rumah tangga di berbagai provinsi di Pulau Jawa.



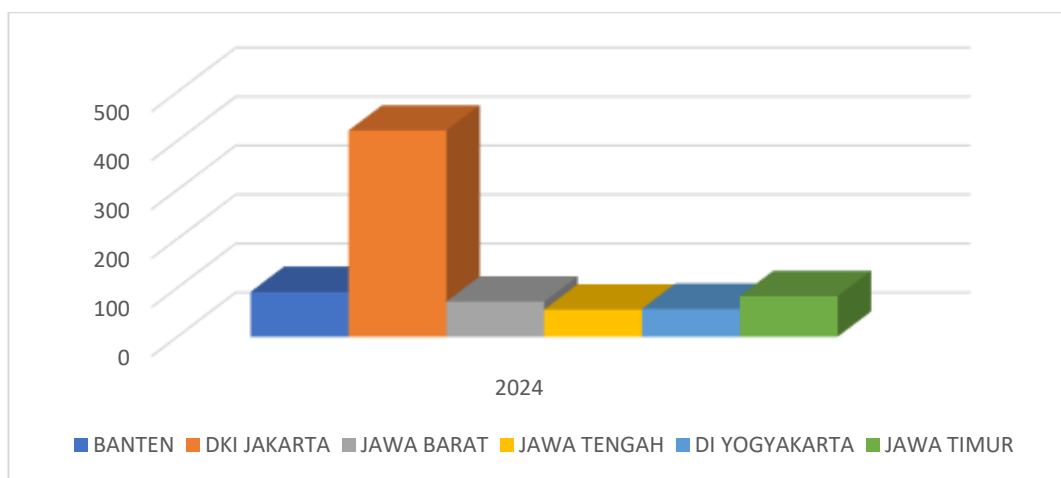
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (data diolah)

**Gambar 1.4 Konsumsi Rumah Tangga di Pulau Jawa Menurut Provinsi Tahun 2024 (Miliar Rupiah)**

Berdasarkan Gambar 1.4 Konsumsi Rumah Tangga yang mencerminkan seberapa kuat daya beli masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa konsumsi masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. DKI Jakarta menempati posisi teratas dalam hal konsumsi rumah tangga, dengan nilai mencapai Rp1.261.296,98 miliar. Angka yang sangat besar ini menandakan tingginya daya beli masyarakat kota tersebut, terutama karena aktivitas ekonomi di Jakarta didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa yang sangat bergantung pada permintaan domestik. Ekspektasi terhadap permintaan di masa mendatang, baik yang bersumber dari konsumsi maupun investasi, secara

langsung mempengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja (Reid, 2024). Maka, tingginya aktivitas konsumsi rumah tangga tersebut secara langsung mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Akibatnya, perusahaan semakin aktif dalam kegiatan produksinya, serta memperoleh peluang untuk memperluas usaha dan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Jawa Timur sebesar Rp1.157.247,00 miliar, disusul oleh Jawa Barat yang mencapai Rp998.976,60 miliar. Hal ini tidak mengherankan, mengingat kedua provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar dan aktivitas ekonomi yang sangat dinamis, khususnya di sektor perdagangan, industri rumah tangga, serta UMKM. Jawa Tengah mencatat sebesar Rp685.307,23 miliar. Sementara, DI Yogyakarta mencatat nilai yang jauh lebih kecil, yaitu Rp66.606,15 miliar. Perbedaan ini sangat terlihat, mengingat skala ekonomi dan jumlah penduduk di kedua provinsi tersebut memang berbeda jauh. Provinsi dengan wilayah dan jumlah penduduk yang lebih kecil wajar jika memiliki nilai konsumsi yang lebih rendah. Banten menjadi provinsi dengan nilai konsumsi rumah tangga terendah di tahun 2024, yaitu hanya Rp71.773,49 miliar. Rendahnya angka ini mengindikasikan bahwa pengeluaran rumah tangga di Banten masih relatif kecil, meskipun jumlah penduduk yang bekerja justru mengalami kenaikan. Dengan demikian, peningkatan jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli, setidaknya dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa masih didominasi oleh provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk besar serta ekonomi yang aktif. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di kawasan ini.

Produktivitas tenaga kerja mengindikasikan tingkat efisiensi tenaga kerja dalam menghasilkan output. Secara umum, peningkatan produktivitas akan diikuti oleh pertumbuhan output. Namun, dalam beberapa kasus, peningkatan efisiensi justru dapat menyebabkan penurunan kebutuhan tenaga kerja. Grafik berikut menampilkan perbandingan produktivitas tenaga kerja di berbagai provinsi di Pulau Jawa.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 (data diolah)

**Gambar 1.5 Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa Menurut Provinsi Tahun 2024 (Juta Rupiah per Orang)**

Berdasarkan Gambar 1.5 Produktivitas Tenaga Kerja di Pulau Jawa pada tahun 2024, menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah, meskipun seluruh provinsi tersebut berada di kawasan utama perekonomian nasional. DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan produktivitas sebesar 421.131 juta rupiah per orang, jauh melampaui provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Tingginya produktivitas di Jakarta disebabkan oleh dominasi sektor-sektor bernilai tambah tinggi, seperti jasa keuangan, perdagangan besar, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan. Sektor-sektor ini mampu menghasilkan output yang tinggi meskipun jumlah tenaga kerja yang terserap relatif lebih sedikit

dibandingkan provinsi lain. Peningkatan produktivitas tenaga kerja umumnya diiringi dengan penurunan kebutuhan tenaga kerja, karena efisiensi yang membaik serta transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih modern (Godé et al., 2026). Posisi kedua ditempati oleh Banten dengan produktivitas sebesar 91.7113 juta rupiah per orang, diikuti oleh Jawa Timur dengan 82.8646 juta rupiah per orang. Kedua provinsi ini masih didukung oleh sektor industri dan manufaktur yang kuat, sehingga mampu menghasilkan output yang besar per pekerja, meskipun belum dapat menyaingi Jakarta. Jawa Barat mencatat produktivitas sebesar 71.7559 juta rupiah per orang, disusul oleh DI Yogyakarta sebesar 57.0791 juta rupiah per orang, dan Jawa Tengah sebesar 55.4625 juta rupiah per orang. Rendahnya produktivitas di tiga provinsi terakhir tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja lebih banyak terserap pada sektor-sektor bernilai tambah rendah, seperti industri padat karya, UMKM, dan sektor informal. Hal ini berimplikasi pada rendahnya output per pekerja. Secara keseluruhan, grafik ini mengilustrasikan bahwa pada tahun 2024, tingginya jumlah tenaga kerja tidak serta-merta berbanding lurus dengan produktivitas yang tinggi. Provinsi dengan jumlah tenaga kerja yang besar justru cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah, sedangkan provinsi dengan struktur ekonomi yang lebih modern dan berbasis jasa, seperti Jakarta, menunjukkan produktivitas tenaga kerja yang jauh lebih tinggi. Sejalan dengan hasil penelitian Anggrya dan Maimunah (2024), yang menunjukkan bahwa perbedaan struktur ekonomi di tiap wilayah merupakan faktor utama yang menyebabkan variasi tingkat produktivitas tenaga kerja antara Pulau Jawa dan Sumatera.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pendidikan, investasi, konsumsi rumah tangga, dan produktivitas tenaga kerja secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa pada tahun 2010–2024?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan, investasi, konsumsi rumah tangga, dan produktivitas tenaga kerja secara simultan atau bersama sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa pada tahun 2010–2024?
3. Bagaimana elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pendidikan, investasi, konsumsi rumah tangga, dan produktivitas tenaga kerja di Pulau Jawa pada tahun 2010–2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh pendidikan, investasi, konsumsi rumah tangga, dan produktivitas tenaga kerja secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa pada tahun 2010–2024.
2. Menganalisis pengaruh pendidikan, investasi, konsumsi rumah tangga, dan produktivitas tenaga kerja secara simultan atau bersama sama terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa pada tahun 2010–2024.
3. Menganalisis elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pendidikan, investasi, konsumsi rumah tangga, dan produktivitas tenaga kerja di Pulau Jawa pada tahun 2010–2024.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Hasil penelitian dapat memperkaya literatur, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai relevansi Fungsi Produksi Cobb–Douglas, *Human Capital Theory*, *Classical* dan *Keynesian Aggregate Demand* dalam memahami dinamika penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara variabel makroekonomi dan ketenagakerjaan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini bagi pemerintah pusat maupun daerah, dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan, seperti peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan program wajib belajar. Merumuskan kebijakan investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempermudah perizinan serta mengutamakan untuk menyerap tenaga kerja lokal. Serta, pada produktivitas tenaga kerja perlunya kebijakan peningkatan keterampilan yang tetap berorientasi pada perluasan kesempatan kerja.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari laman instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) atau Kementerian Investasi serta lembaga lembaga publik lainnya yang kredibel. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan secara primer yang dilakukan di suatu tempat tertentu.

### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Rencana jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.1 Jadwal Penelitian yang menggambarkan tahapan penelitian yang telah disesuaikan dengan kalender akademik Universitas Siliwangi.

**Tabel 1.1 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2025/2026																							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																				
2	Penulisan Bab I, II, dan III			■	■	■	■																		
3	Bimbingan & Revisi					■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Seminar Usulan Penelitian													■	■										
5	Revisi Usulan Penelitian															■	■	■	■						
6	Seminar Hasil Penelitian																	■	■						
7	Revisi Hasil Penelitian																			■	■				
8	Sidang Skripsi																					■	■	■	■
9	Revisi Skripsi dan Pengesahan Skripsi																					■	■	■	■